

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aemanah, U. & Sihombing, D. R. (2025). *Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Azheri, B., (2012), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Efrianto, G. & Rahman. D. (2024) *Tindak Pidana Pemalusan Dalam Akta Otentik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi.
- Fiantika, F. R., & Wasil, M.,dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Gunardi, (2022). *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Hadin, M. M. (2015), *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Isnaini, A. A. L., & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.
- Kristian, (2016), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung, Redika Aditama,
- Lubis, M. R. (2024). *Menakar delik pidana dunia pendidikan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti.
- Mukti, F. & yulianto, A., (2010), *Dualism of Empirical and Normative Legal Research*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi & Nawawi, A. B., (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,
- Mulkan. H., & Aprita. S., (2023). *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Napitupulu, D. R., & Widyani, I. (2022). *Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press
- Rahardjo, A., (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing,
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sulardi, (2017), *Hukum Administrasi Negara Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah*. Malang, Setara Press,
- Surbakti, S. N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto, (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta. Deepublish.
- Tomo. H. S. (2023). *Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)*, Jakarta, Indocamp.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

B. JURNAL

- Amaliyah, (2025), Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 741
- Ananta, A. R. R., Syah, D. T. B., & Erlangga, Z., (2025), Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional, *jurnal puspaka*, 1(11), 55
- Arasy, A. H. M., & Rizkianti, W., (2025), Construction of Sea Barriers in Tangerang Based on Agrarian Law Perspectives and Implementation Issues, *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, 19(3), 699
- Basri, H., (2020), Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 8(2), 6-7
- Budi, P. B., (2025), Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum Dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” Di Pantai Utara Tangerang, *jurnal Unes Law Review*, 7(3), 1225-1226
- Cahyati, S. N., dkk, (2025,) Nalisis Dampak dan Pemenuhan Hak Korban dalam Kasus Pagar Laut Ditinjau Berdasarkan Perspektif Greenvictimology, *jurnal ukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 154-169

- Candra, F. A., & Sinaga, F. J., (2021), Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43
- Octaviani, D., & Hendrawarman, (2025), Analisa Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Wilayah Laut Pantai Indah Kapuk 2, *jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 492
- Riyawan, D. P., & Ibrahim, A. L., (2024), Optimalisasi Pra Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Agung Ri, *jurnal syariah dan hukum*, 22(1), 226
- De Vries, W. T., & Puji, S. (2025). *Balancing between land and sea rights—An analysis of the ‘pagar laut’ (sea fences) in Tangerang, Indonesia*. *Land*, 1382(14), 3.
- Eichmanns, C., dkk. (2021). *Sand trapping fences as a nature-based solution for coastal protection: An international review with a focus on installations in Germany*. *Environments*, 135(8), 2
- Eryarifa, S., (2022), Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 116-117
- Fajar, M. A., Qamar, N., & Alam, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Yang Di Batalkan Pengadilan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 649-665.
- Fatika, Y. R., (2025), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Sertifikat Tanah: Analisis Hukum Agraria Dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(9), 2-5
- Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., dkk. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140-153.
- Fernando & Kansil, (2014), Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp, *jurnal lex crimen*, 3(3),26
- Fikarudin, W., Martadikusuma, A. D., & Pratama, S. Y. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepektif Hukum Progresif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 388.
- Fiko, R. G., dkk, (2025), Legalitas Dan Dampak Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Permukaan Laut: Perspektif Hukum Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Indonesia, *jurnal Batavia*, 2(1), 28

- Gaho, F. (2023). Mekanisme Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Panah Hukum*, 2(1), 50-69.
- Harefa, S., & Nashir, M. A., (2025), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, ADIL: *Jurnal Hukum*, 16(1), 37
- Harris, F., & Meilana, (2025), Tanggung Jawab Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam Penerbitan Sertifikat Ilegal di Laut, *Jurnal Arus Jurnal Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2243
- Harry, M., dkk., (2025), Sea Fence and Public Policy: Impact on the Welfare of Fishermen Families in tangerang, Indonesia, *el-usrah: jurnal hukum keluarga*, 8(1), 668
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Igo, M., Amiruddin & Ufran, (2022), Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatann*, 10(2), 707
- In, S., Pujiestu, S., Oktafiana, D. A., dkk, (2025), Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(4), 118
- Ilham, M., (2025), Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan, *jurnal Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 31
- Irawan, M. A. F., Wahyuni, R., (2025), Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Terbitnya Sertifikat Tanah Proyek Pembangunan Pagar Laut, *Jurnal Academia Open*, 10(2), 10
- Kowalski, Miller, & Lee, (2022), Transparency in Public Communication: Building Trust and Engagement in Governmental Decision Making. *Journal of Public Relations and Communication*, 45(3), 112-130.
- Latifah & Santoso, D. A., (2020), "Protection of Indigenous Peoples' Rights in Coastal Area Utilization," *Journal of Law and Development*, 50(1), 123–140.

- Lukmanul, H. M. & Agus, M. E, (2025), Elanggaran Keamanan Maritim Pagar Laut Dan Solusi Pencegahannya, *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(5)., 721-722
- Maghribi, G., Alif, B. S. F. & Rosalia, P. G., (2025), Kajian Hukum Lingkungan Dan Implikasi Sosial-Ekonomi Dampak Pemasangan Pagar Laut Di Tangerang, *jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(11), 6
- Maghribi, G., Syaputra, F. A. B. & Paat, G. R. (2025). Kajian Hukum Lingkungan dan Implikasi Sosial-Ekonomi Dampak Pemasangan Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(11).
- Mathar, A., (2023), Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *jurnal hukum keluarga islam dan islam*, 3(2), 47
- Muksin, M. R. S., (2023), Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 241
- Oloan, N. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah. *Jurnal Warta*, 50(5).
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Prihandoyo, Y. M., (2025), Akibat Hukum Penerbitan Hak Guna Bangunan Di Atas Laut Dakam Perspektif Hukum Agraria Dan Tata Ruang, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(2), 25
- Putra, F. M. K. (2015). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. *Perspektif*, 20(2), 101-117.
- Rastra, S. M. M., (2023), Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1),241
- Risqiyah, N., (2026), Legalitas Pemagaran Laut Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan Hukum Agraria, *jurnal al-zayn jurnal ilmu sosial & hukum*, 4(1), 3676
- Rizal, R. A. A., Tri, B. S. D. & Erlangga, Z., (2025), Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional, *jurnal puspaka*, 1(11)., 55
- Roiqoh, S., & Ayu, N., (2025), Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah PesisirStudiKasus Pagar Laut di Tangerang, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 79-80

- Rosy, R. J., Ratna, M. V., & Suar A., (2024), Tinjauan Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Penataan Ruang, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 6(2), 37
- Rumbiak, J. R., Multiwijaya, V. R., & Suar, A., (2024), Tinjauan Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Penataan Ruang, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 6(2), 37
- Rusdianto, M., & Watunnaba, Nuris., (2025), Pagar Laut dan Eksklusi Masyarakat Pesisir: Kajian Literatur atas Ketimpangan Akses di PIK Tangerang, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 11(2), 247
- Saputra, D., Putra, D. A., Putri, I. S., dkk. (2025). Analisis Yuridis Peristiwa Pagar Laut Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Laut Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 185-191.
- Satmaidi, E., (2015), Konsep deep ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2),192-105.
- Saylendra, R., Latifah. R. D., dkk, (2025), Analisis Yuridis Pembangunan Pagar Laut Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(11), 8
- Sugeng, M. G., dkk., (2025), Case Study of the Sea Fence in Tangerang from a Legal Perspective: Environmental Impact and Maritime Jurisdiction Dispute, *Jurnal Hukum Diponegoro*, 25(1), 22
- Taufiq, A. z., Alvaro, D. S., & Hafidz, A. A., (2025), Privatization Through Building Use Rights In The Tangerang Sea Fence Area According To Positive Law, *Syiar Hukum Jurnal Hukum*, 22(2), 35
- Tool, M. Ro., Arief, S. A., (2025), Hak Atas Laut dalam Bentuk Sertifikat: Peningkaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU VIII/2010. *Iuris Studia Jurnal kajian hukum*, 6(1), 37
- Ubaidillah, L., Rahma, A. B., & Andriansyah, I. A. N., (2025), Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(1), 6
- Wibowo, W. F., & Yusuf, H., (2025), Kriminologi Lingkungan Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pagar Laut Di Tangerang, *jurnal ative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2744

Yunia, R. F., (2025), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Sertifikat Tanah: Analisis Hukum Agraria Dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(9), 2-5

Zamil & trinamansyah, (2022), Peran Notaris Dalam Perjanjian Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Oleh Swasta, *jurnal imu hukum kenotariatan*, 5(2),166

C. SKRIPSI, TESIS

Abiyansha. M. A., (2023) “*Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya Ilmu Alat Pengabdian, Palembang. 11

Azmi. (2023). Penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan illegal fishing di Selat Malaka, *Tesis Universitas Medan Area*. 26

Gaupama, D. R. (2022). Fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 19

jusmiarni. (2016)“ *Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/Pn Makassar)*”. Skripsi, Uin Alauddin Makassar, Makassar. 8

Maskurung, S. M. (2021). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, 24

Pratama, R. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE (Putusan No. 521/Pid.Sus/2020/PN Pal dan Putusan No. 3652/Pid.B/2020/PN Mdn), *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 17-18

Riezyad, M. R. (2013) “*tinjauan yutidis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (studi kasus putusan Nomor 1231/PID.B/2021/PN.MKS)*”, skripsi, universitas hasanuddin Makassar, makassar. 3

Sitorus, L. E. S. (2016). Konflik norma pengaturan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan mangrove, *Skripsi Universitas Brawijaya*, 22-23

Sulasdi, (2022)“*Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/Pn Makassar)*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar. 6

Viani. A. D., (2023) “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, skripsi, Uin Raden Fatah Palembang, Palembang. 3

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

E. SUMBER INTERNET LAINNYA

Admin, Kontroversi Pagar Laut 30-an KM Mulai Terkuak: Ada Usaha Konglomerat Didalamnya, Artikel <https://mediatransformasi.com/2025/01/24/kontroversi-pagar-laut-30-an-km-mulai-terkuak-ada-usaha-konglomera-t-didalamnya/>, Diakses pada 15 September 2025.

Andreas A. salim dkk, pagar laut dibongkar what's next?, Artikel: <https://oceanjusticeinitiative.org/main/wp-content/uploads/2025/05/Studi-Kasus-Pagar-Laut.Pdf&ved=2ahUKEwjTtKiZnoiTaxVTV2wGHdo4Ji wQFno ECCc QAQ&u sg= AOv Vaw1 evAvkwE IVg lat - lpf5 Hq>, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2025.

Lubis, R. E. L., Pagar laut 'misterius' sepanjang 30 kilometer di pesisir Tangerang, apakah kelanjutan proyek reklamasi di Jakarta?, Artikel <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdd6dpeym10o>, Diakses pada 15 Agustus 2025.

Marwah, D., Ombudsman RI: Kerugian nelayan akibat pagar laut di Tangerang capai Rp 9 miliar, Artikel <https://www.tempo.co/politik/ombudsman-ri-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-capai-rp-9-miliar-1197425>, Diakses pada 15 September 2025.

Pradana, A., Ini Aturan Hukum Pagar Laut Di Indonesia, Artikel <https://beritahukum.id/2552/hukum-kita/ini-aturan-hukum-pagar-laut-di-indonesia/>, Diakses pada 10 Agustus 2025.

Setyawan, D., Apa Itu Pagar Laut Di Tangerang, Fungsi, Dan Kenapa Ilegal?, Artikel <https://tirto.id/apa-itu-pagar-laut-di-tangerang-fungsi-dan-kenapa-ilegal-g7jv>, Diakses pada 15 Agustus 2025.

Written By Timhukum, Opini Hukum Terhadap Kasus Pagar Laut Misterius Di Perairan Tangerang, <https://www.surabayalawfirm.com/opini-hukum->

terhadap-kasus-pagar-laut-misterius-di-perairan-tangerang/, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2025.

yuliatin, L., & Firdaus, E. Polisi Duga Ada Pemalsuan dan Pencucian Uang di Kasus Pagar Laut Tangerang, Artikel <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1794783-polisi-duga-ada-pemalsuan-dan-pencucian-uang-di-kasus-pagar-laut-tangerang>, diakses tanggal 3 November 2025.